



# Kemenkumham Komitmen Transparansi Kelola Anggaran

**PONTIANAK, TRIBUN** - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat melakukan rekonsiliasi di seluruh jajarannya sebagai komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di jajaran Kemenkumham Kalbar.

"Rekonsiliasi ini bertujuan memastikan pengelolaan anggaran yang akurat, transparan, dan sesuai de-

ngan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), baik di lingkungan Kanwil Kemenkumham, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, maupun Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Joni Pesta Simamora di Pontianak, belum lama ini.

Joni menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintah-

an yang baik.

"Laporan keuangan yang kami susun bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, tetapi juga mencerminkan profesionalisme kami dalam mengelola keuangan negara sesuai dengan regulasi yang berlaku," tuturnya.

Pra-rekonsiliasi ini melibatkan penyusun laporan keuangan, pengelola BMN, serta operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari berbagai mo-

dul, seperti Modul Persediaan, Modul Aset, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap). Seluruh peserta melakukan pengecekan, penyesuaian, dan verifikasi data keuangan serta BMN guna memastikan kesesuaian dan kelengkapan sebelum proses audit berlangsung.

Dia mengatakan perubahan pemerintahan pada Kabinet Merah Putih tidak boleh mengganggu kualitas tata

■ Bersambung ke hal. 10